



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES INDONESIA)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 November 2021, Pukul 13.30 WIB – 12.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Budi Djatmiko

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Didi Cahyadi Ningrat
2. Guntur Abdurrahman
3. Khairul Abbas

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Pemohon atau Kuasanya, sidang kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kuasa atau Prinsipal, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum dari HPTKes. Saya adalah Guntur Abdurrahman, di sebelah kanan saya Didi Cahyadi Ningrat, sebelah kiri saya Khairul Abbas, Yang Mulia. Kami hadir bertiga, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Jadi yang juru bicaranya Pak Guntur, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya, Yang Mulia. Hari ini saya, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Apakah akan dihadiri oleh Prinsipal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Informasinya ya, Yang Mulia, tapi sampai sekarang belum on ... belum online, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Yang penting kuasanya sudah hadir, jadi sidang bisa kita mulai, ya. Nah, sidang hari ini adalah sidang Perbaikan Permohonan. Kepada Kuasanya, silakan menyampaikan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Jadi, tidak perlu dibacakan semua, yang Pokok-Pokok

Perbaikannya saja. Silakan, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Ketua Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami langsung masuk ke Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Selaku ... Pemohon selaku badan hukum publik ... badan hukum privat, yaitu selaku Ketua HPTKes Indonesia Masa Periode 2015 sampai 2020, Yang Mulia, namun karena keadaan wabah pandemi, masa jabatan Pemohon selaku Ketua HPTKes telah diperpanjang berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Juni 2020.

Nah, Pemohon merasa dirugikan karena berlakunya norma Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Pasal 21 ayat (1) sepanjang frasa *secara nasional* dan ayat (7) tentang Tenaga Kesehatan, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Adapun Pokok Permohonannya, Yang Mulia, pada pokoknya Pemohon menilai berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) sepanjang frasa *secara nasional* dan ayat (7) undang-undang tentang Tenaga Kesehatan ini telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Yang kedua, bertentangan dengan keadilan yang telah merugikan Pemohon, Yang Mulia. Nah, untuk itu, Pemohon selaku HPTKes Indonesia yang membawahi 1.500 perguruan tinggi kesehatan swasta di Indonesia berdasarkan stelsel pasif mengajukan permohonan untuk menguji pasal a quo yang diduga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

Kurang lebih, itu permohonan kami, Yang Mulia. Kesimpulannya, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, silakan bacakan Petitemnya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan frasa *secara nasional* pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi ketentuan norma Pasal 21 ayat (1) yang konstitusional adalah "...mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi."

2. Menyatakan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Kemudian, saya ingin catatan klarifikasi dulu, yang pertama, terkait dengan Legal Standing, itu tadi disampaikan bahwa ini berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Juni 2020. Benar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Boleh diinformasikan lebih lengkap, rapat apa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Baik, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Ditambahkan atau melengkapi. Rapat ini adalah rapat yang diselenggarakan oleh panitia Mukernas, Mukernas yang dilaksanakan oleh HPTKes yang pada pokoknya adalah

berdasarkan hasil rapat dan kemudian hasil dari panitia Munas oleh karena pandemi dan ... apa ... dengan kondisi yang ada, itu tidak dapat melakukan Munas sampai ada keadaan ... kebijakan nasional dari pemerintah. Untuk itu, rapat dari Mukernas itu juga memutuskan untuk melakukan perpanjangan terhadap pengurus dan kemudian melakukan upaya hukum terhadap terkait dengan mengawal proses uji kompetensi secara nasional ini. Jadi, ada terlampir dalam bukti kami, Yang Mulia.

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, saya ingin konfirmasi. Rapat panitia Mukernas atau rapat peserta Mukernas?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Peserta Mukernas, Yang Mulia.

20. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Peserta? Bukan panitia? Tolong dipastikan dulu karena alasan pandemi kan tidak bisa dilaksanakan Mukernas. Dipastikan, apakah rapat panitia Mukernas atau rapat Mukernasnya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia. Kita bacakan, Yang Mulia, lengkapnya.

22. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Sesuai hasil rapat kerja nasional tanggal 12 Juni 2020 dari hasil rapat kerja nasional (...)

24. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Rakernas, ya. Bukan Mukernas, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Rakernas. Izin, Yang Mulia, terima kasih.

26. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Penundaan pelaksanaan Munas ke-2 yang selanjutnya berkaitan dengan waktu kepengurusan di pusat maupun di wilayah yang seharusnya sudah berganti, maka sesuai hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020 yang dihadiri oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah, maka secara ... apa ... dengan kesepakatan aklamasi bahwa kepengurusan HPTKES di tingkat pusat maupun tingkat wilayah untuk diperpanjang sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk diadakan munas kedua. Dengan demikian, maka susunan kepengurusan, baik pengurus pusat maupun pengurus wilayah masih berlaku sampai dilaksanakan munas kedua. Demikian, Yang Mulia, tertanggal ... surat tertanggal 13 Juni 2020 dan hasil rapat tanggal 12 Juni 2020, Yang Mulia.

28. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, berarti ini rapat antara pimpinan pusat dan pimpinan wilayah, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Nah, betul, Yang Mulia.

30. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pimpinan pusat dan pimpinan wilayah. Ini rapatnya luring atau daring, nih?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Yang sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, ini rapat kerjanya secara langsung, Yang Mulia.

32. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Langsung, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Langsung, betul, Yang Mulia.

34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tempatnya di mana?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ini tempatnya ... sebentar, Yang Mulia, dilaksanakan di Yogya pada ... maaf, ini yang munasnya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, rapat ini dilaksanakan dari informasi yang kita dapatkan dari pengurus, itu dilaksanakan di Yogya, Yang Mulia.

36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Di Yogya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tanggal 12 Juni 2020.

38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

12 Juni 2020, ya. Jadi, itu nama forumnya apa?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Rapat kerja nasional, Yang Mulia.

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Rapat kerja nasional. Oke.

Nah, pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi ini?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Pengambilan keputusan tertinggi, Yang Mulia, itu berdasarkan munas, Yang Mulia.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Munas, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tetapi (...)

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Di bawah munas apa? Pengambilan keputusan setelah di bawah munas?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Rapat kerja nasional, Yang Mulia.

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Rakernas, ya? Oke, berarti ini diputuskan di Rakernas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setelah munas?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, yang dihadiri oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah. Oke, itu yang pertama.

Yang kedua, sedikit juga klarifikasi, tadi soal menggunakan istilah stelsel pasif, jumlah keanggotaannya tadi 1.000 berapa jumlahnya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

1.500, Yang Mulia, di halaman ... izin sebentar, Yang Mulia.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, sambil mencari, kalau bicara stelsel pasif berarti ada stelsel aktif, ya. Kalau sistem pasif itu, kan walaupun tidak terdaftar, kan bisa diklaim bahwa itu adalah bagian dari anggota. Boleh dikonfirmasi kalau yang aktif terdaftar itu berapa jumlahnya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik. Berdasarkan catatan kami, Yang Mulia, sesuai dengan bukti, kita ada sekitar 936, Yang Mulia.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, 936 di halaman 5, ya? Sesuai dengan perbaikan permohonan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, Yang Mulia.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, tapi kalau untuk stelsel pasifnya 1.500- an, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, yang pasifnya 1.536, Yang Mulia.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, itu yang 936 masuk dalam bukti?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Masuk, Yang Mulia.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bukti P-5 itu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, baik. Baik, tidak ada masukan lagi dari Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Manahan. Kami ingin konfirmasi dulu sebelum pengesahan alat bukti. Permohonan pertama itu diserahkan 17 alat bukti, P-1 sampai dengan P-17, apakah betul? Permohonan pertama?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Betul, ya.

Kemudian, perbaikan Pemohon mengajukan lagi Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, betul?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Nah, dari bukti yang diajukan pertama dan kedua apakah ada kesamaan atautkah berbeda sama sekali?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ada persamaan, Yang Mulia, tetapi ada pengurangan untuk rasionalisasi permohonan berdasarkan masukan dan kemudian arahan dari perbaikan yang terdahulu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Nah, tolong disampaikan dulu yang sama yang mana? Supaya kita hanya mengesahkan alat bukti yang berbeda, tidak yang sama.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia. Pertama, P-1, tetap.

68. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

P-1 tetap.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Kemudian, ada yang baru terkait dengan perbaikan kemarin, yaitu P-2, yaitu legalitas tentang prinsipal dan/atau legal standing-nya.

70. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, coba agak dekat mik supaya suaranya agak keras.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, yang P-2 itu surat edaran himpunan perguruan tinggi, Yang Mulia, terkait dengan legalitas perpanjangan kepengurusan.

72. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Yang P-3 itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

P-4 nya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian rekap daftar perguruan tinggi yang prodi kesehatan Indonesia yang menjadi anggota dari stelsel aktif dari HPTKes Indonesia.

Kemudian, P-6 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bukti P-7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Bukti P-8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Bukti P-9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

P-10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 ... 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja.

Bukti P-11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PT (Perguruan Tinggi).

Bukti P-12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Demikian, Yang Mulia.

74. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, yang P-13 sampai dengan 17 mau dijadikan bukti atau tidak?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tidak, Yang Mulia.

76. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tidak, ya? Jadi, hanya P-1 sampai P-12?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

78. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, untuk yang P-1 itu ada kekurangan lembar, itu mau yang dipakai P-1 yang awal atau yang baru?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Izin, Yang Mulia. Kita memakai P-1 yang pertama, Yang Mulia.

80. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, jadi P-1 yang pertama yang dipakai. Kemudian, P-2 sampai P-12 itu setelah perbaikan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Setelah perbaikan, Yang Mulia.

82. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Betul. Berarti ada 12 bukti, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

84. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, jadi untuk perkara ini, kami sahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, khusus untuk P-1 menggunakan permohonan awal.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

86. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bukti yang lama, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

88. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

89. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Permohonan ini sudah kami terima dan nanti Panel akan menyampaikan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim, nanti hasil Rapat Pemusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pemohon, ya. Jadi, nanti pemohon menunggu sampai dengan Rapat Pemusyawaratan Hakim, nanti akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Apakah ada lagi yang mau disampaikan?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, yang Mulia.

94. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Kalau tidak ada, maka sidang hari ini Permohonan Nomor Perkara 56/PUU-XIX/2021 saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.54 WIB

Jakarta, 15 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).